

# KINERJA ASURANSI UMUM SIAP MELAJU KENCANG

Bisnis, JAKARTA — Kinerja asuransi umum di Indonesia berpotensi terdongkrak selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang siap menjalankan program strategis pada periode 2024-2029.

Akbar Maulana Al Ishaqi  
redaksi@bisnis.com

**D**irektur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwyanto mengatakan bahwa ada banyak peluang pertumbuhan dengan program strategis yang memfasilitasi pembelian bahan baku dan distribusi barang, seperti inisiatif makan bergizi gratis serta perdagangan lokal.

Menurutnya, program itu akan meningkatkan permintaan terhadap asuransi terkait dengan pengiriman barang, yang pada gilirannya memperkuat sektor asuransi umum di Tanah Air. "Kalau saya lihat dari perdagangan otomatisasi pembelian-belian tadi, contoh bahan-bahan tadi kalau dikaitkan dengan program makan gratis," katanya sesuai konferensi pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia melanjutkan program menggalakan perdagangan lokal juga memacu distribusi barang yang secara otomatis berdampak kepada pengiriman barang.

Akan tetapi, Bern menyinggung situasi geopolitik yang masih menjadi tantangan industri asuransi umum khususnya terkait asuransi *marine cargo*. Namun, dia menyebut bahwa dampaknya masih belum signifikan. "Menurut saya belum terlalu banyak berdampak gitu ya. Ada mungkin tapi mungkin enggak signifikan menurut saya ya karena ini kan masih berjalan terus," katanya.

Bern menekankan negosiasi dan diplomasi dalam menghadapi risiko geopolitik yang memanas, terutama terkait perlindungan kapal-kapal asal Indonesia.

"Jadi negosiasi dengan pihak luar juga penting sih dibangun untuk kita bisa tetap melakukan

pelayaran, bisnis, dan lain-lain," katanya.

Data AAUI per semester I/2024, asuransi *marine cargo* mencatatkan premi sebanyak Rp2,78 triliun yang mana meningkat sebanyak 10,2% secara tahunan (*year on year*/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebanyak Rp2,52 triliun.

Secara keseluruhan, premi asuransi *marine cargo* pada semester I/2024 mencapai Rp57,91 triliun atau naik 18,4% YoY dari sebelumnya Rp48,9 triliun pada semester I/2023.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyatakan pasar asuransi umum juga memiliki tantangan yang tidak mudah salah satunya berurusan dengan industri penjaminan.

Pada hal itu, pemerintah telah memasang target tinggi penetrasi penjaminan mencapai 3,5% pada 2028. "Memang harus diakui ada beberapa yang kuenya [pasar] penjaminan dari kita. Begitu sebaliknya, kuenya yang ada di asuransi ada di penjaminan," kata Budi kepada *Bisnis*.

Berdasarkan data OJK, dalam periode 2020—2023 pendapatan imbal hasil penjaminan (IJP) tidak mampu mengejar selisih atau gap dengan pendapatan premi asuransi kredit. Pada 2023, premi asuransi kredit sebesar Rp30,76 triliun (80%), dan IJP hanya Rp7,92 triliun (20%).

Budi menjelaskan output dari kajian pasar tersebut diharapkan lahir regulasi yang mengatur lebih jelas pasar dua industri ini.

Sejak terbitnya Undang-Undang Penjaminan perusahaan asuransi umum dianggap tidak lagi dapat memasarkan produk penjaminan atau *suretyship*. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, lini usa-

ha *suretyship* dapat dilakukan oleh perusahaan penjaminan dan asuransi.

Atas pasar yang masih tumpang tindih ini, OJK berupaya mengembalikan kemurnian industri penjaminan dan industri asuransi sesuai karakteristik masing-masing.

Hal itu dilakukan dengan menegaskan bahwa penjaminan untuk diselenggarakan oleh perusahaan penjaminan. Untuk segmen non-perusahaan penjaminan seperti perusahaan asuransi umum yang akan menyelenggarakan usaha penjaminan perlu membuat Unit Usaha Penjaminan (IUP), mendirikan anak usaha penjaminan, atau mengalihkan portofolio usaha penjaminannya kepada perusahaan penjaminan.

Bila hal itu diimplementasikan, dia menegaskan sedikit banyak berpengaruh pada industri asuransi khususnya lini bisnis asuransi kredit. "Ya lumayan. Karena kontribusi dari lini usaha itu [asuransi kredit] cukup tinggi, besar," kata Budi.

Dalam dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024—2028, OJK menyebut persaingan pasar perusahaan asuransi umum menjadi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan dalam melakukan penjaminan kredit atau pembiayaan sebagai lini bisnis utamanya.

"Hal ini menunjukkan jika premi asuransi kredit 3,88 kali lebih besar dibanding IJP perusahaan penjaminan," tulis dokumen peta jalan tersebut.

Minornya jumlah IJP dibanding nilai premi asuransi kredit dan *surety bond* ini sudah menjadi tren sejak 2020.

Pada 2020, nilai premi asuransi kredit dan *surety bond* sebesar Rp23,71 triliun, dibanding IJP hanya Rp3,30 triliun. Kemudian pada 2021, nilainya masing-masing Rp17,41 triliun dibanding Rp5,60

**“ Kalau saya lihat dari perdagangan otomatisasi pembelian-pembelian tadi, contoh bahan-bahan tadi kalau dikaitkan dengan program makan gratis.**

triliun. Dan pada 2022 masing-masing sebesar Rp18,02 triliun dibanding Rp6,99 triliun.

#### TERUS DIMONITOR

Sebaliknya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan OJK memonitor pertumbuhan premi asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum.

"Asuransi umum itu tumbuh dobel digit. Artinya masih tumbuh. Asuransi jiwa karena terkoreksi oleh program-program yang berisiko, itu masih terkonsolidasi dan sudah pada positif," kata Ogi.

Saat ini, Ogi menegaskan dampak terhadap asuransi umum belum terlihat. Terlebih pertumbuhan premi asuransi umum masih baik. "Kami tunggu saja nanti dampaknya," katanya.

Sebelumnya, tren penurunan penetrasi asuransi menjadi tantangan fundamental tersendiri bagi industri, baik regulator ma-

upun pemain mesti melakukan reformasi signifikan.

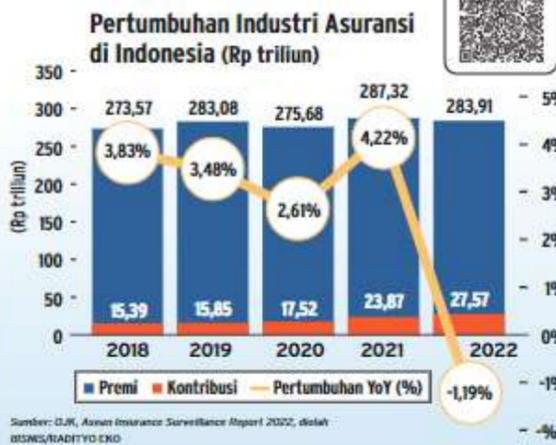
Sejak 2020, penetrasi asuransi mengalami penurunan dari 3,11% menjadi 2,59% pada 2023. Kondisi itu memerlukan perhatian, apalagi penetrasi asuransi di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di antaranya Malaysia 4,8%, Australia 3,3%, Brasil 3,3%, Jepang 7,1%, Singapura 11,4%, dan Afrika Selatan 12,6%.

AAUI telah menyoroti rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Sebenarnya, industri asuransi secara konsisten menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, dibuktikan oleh peningkatan premi dan aset.

Dari data OJK per Agustus 2024, aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.132,49 triliun, meningkat 1,32% secara tahunan (YoY). Namun, kontribusi asuransi terhadap perekonomian nasional relatif stagnan.

AAUI melihat masih ada peluang perluasan pasar. Selain itu, peningkatan volatilitas harga pangan dan energi, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik, ekonomi Indonesia bisa tumbuh stabil, didorong peningkatan belanja publik, meningkatnya investasi, dan permintaan konsumen stabil.

Sektor swasta Indonesia dicirikan banyak perusahaan kecil, tetapi dominasi ekonomi hanya dari sedikit perusahaan besar. 



■ Kinerja asuransi di Indonesia belum menggembirakan dibuktikan dengan penetrasi asuransi yang lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia bahkan Singapura.  
■ Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki tugas menaikan penetrasi dan densitas asuransi di Tanah Air.

